

Judul : Tiga Calon Manajer Tewas Saat Latsarmil
Tanggal : Jumat, 26 Juni 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

Tiga Calon Manajer Tewas Saat Latsarmil

Meninggalnya tiga calon manajer Koperasi Merah Putih dalam pelatihan dasar kemiliteran menjadi momentum untuk mengevaluasi bentuk pelatihan tersebut. Mereka lebih butuh pelatihan manajerial usaha.

JAKARTA, KOMPAS — Tiga calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KD-KMP meninggal saat mengikuti pelatihan dasar kemiliteran atau latsarmil. Selain mengevaluasi bentuk pelatihan tersebut, peristiwa ini juga menjadi momentum untuk lebih fokus menyiapkan keterampilan yang dibutuhkan bagi para calon manajer koperasi itu.

Tiga calon manajer KDKMP yang meninggal adalah Yonanda Mubammad Taufiq, Novia Rahmadhani Sihotang, dan Anisa Muvassarrat. Yonanda, yang mengikuti pelatihan di Satuan Pendidikan Pusat Latihan dan Tempur Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI AD di Baturaja, meninggal 17 Juni 2026 akibat *cardiac arrest* (henti jantung).

Adapun Novia, yang mengikuti pelatihan di Satuan Pendidikan (Satdik) Pusat Bahasa (Pusbahasa) Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Udara di Jakarta, meninggal 18 Juni

>> BACA JUGA:

Setelah 3 Nyawa Melayang

Belajar dari kasus meninggalnya peserta latihan dasar kemiliteran Koperasi Merah Putih di daerah lain, Brigif 1 Marinir Cilandak mengambil sejumlah langkah pencegahan. **KOMPAS**

kompas.com/latsarmil

2026 akibat gangguan kesehatan berakibat dengan tuberkulosis (TBC). Adapun Anisa, yang mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI AD di Balikpapan, meninggal 23 Juni 2026 akibat *heat stroke* (serangan panas ekstrem).

Ketiganya merupakan bagian dari 30.000 calon manajer KD-KMP yang lolos seleksi mengikuti pelatihan dasar kemiliteran sejak 17 Juni 2026. Mereka

[Bersambung ke him 15 kol 4-5]

Pelatihan Dasar Kemiliteran Calon Pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)

Tujuan: Memperkuat kepemimpinan, kedisiplinan, semangat pengabdian, wawasan kebangsaan, dan kapasitas para calon pengelola dalam menjalankan tugas di KDKMP dan KNMP.

Peserta:
30.000 calon pengelola KDKMP
5.476 calon pengelola KNMP

Waktu: 17 Juni–31 Juli 2026
30 hari pelatihan kemiliteran/kedisiplinan
15 hari pelatihan manajerial

Materi:
• Kedisiplinan, kepemimpinan, kerja sama tim, integritas, semangat pengabdian, dan *core value*
• Materi manajerial dan kompetensi bidang yang disusun bersama kementerian terkait

Lokasi:
67 satuan pendidikan militer TNI di seluruh Indonesia.



Sumber: www.kompas.com/goreng dan www.kompas.com/kompas. Grafik: Jajang Kurniawan

INPROJEKTVAS 000

Tiga Calon Manajer Tewas

(Sambungan dari halaman 1)

mengikuti pelatihan selama sekitar 1,5 bulan di sejumlah lokasi di seluruh Indonesia, di bawah kendali Kementerian Pertahanan. Materi pelatihan mencakup kedisiplinan, bela negara, wawasan kebangsaan, serta kemampuan manajerial yang kurikulumnya disusun Kementerian Koperasi.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigadir Jenderal Rico Ricardo, Kamis (25/6/2026), menyatakan, semua peserta telah mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan dasar kemiliteran.

Meraka menepelajari, antara lain, kedisiplinan, bela negara, wawasan kebangsaan, serta kemampuan manajerial yang kurikulumnya disusun Kementerian Koperasi.

Namun, menyusul peristiwa itu, Kemhan bersama panitia seleksi nasional dan penyelenggara pendididkan terus melakukan evaluasi dan penguatan pengawasan kesehatan peserta. Hal ini untuk memastikan keselamatan dan kesehatan peserta tetap menjadi prioritas utama dalam program ini.

Meninggalnya tiga calon manajer KDKMP itu memantik reaksi dari berbagai pihak. Komisi I DPR menyayangkan jatuhnya korban jiwa dalam pelatihan dasar kemiliteran bagi para calon manajer KDKMP.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Mayor Jenderal (Purn) TB Hasanuddin meminta kejadian ini menjadi bahan evaluasi serius terhadap desain pelatihan yang diberikan kepada calon pengelola koperasi.

Menurut Hasanuddin, evaluasi yang dilakukan tidak hanya terhadap mekanisme seleksi kesehatan. Berkaca dari kematian para peserta, pelatihan ini juga harus memperhatikan tingkat intensitas latihan, pengawasan medis selama kegiatan, serta kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan tugas peserta.

"Kalau memang peserta dipersiapkan untuk jabatan manajerial, fokus utama sebaiknya diberikan pada pelatihan manajemen koperasi, penguatan kapasitas organisasi, dan pelatihan teknis yang relevan," ujar Hasanuddin.

Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Dave Laksono juga mendorong perbaikan dalam pola pelatihan terhadap para peserta. "Bila-mana harus ada yang diperbaiki, diubah, itu jadi masukan yang harus diterima untuk menyempurnakan program itu, sehingga program yang dibuat untuk kepentingan bangsa dan masyarakat ini benar-benar bisa berjalan," katanya.

Bahaya militerisme

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyayangkan adanya warga sipil yang harus kehilangan nyawa karena mengikuti pelatihan program pemerintah yang dinilai bermasalah se-

jak awal. Permasalahannya lebih besar karena dua calon manajer yang meninggal pada 17 dan 18 Juni lalu baru diumumkan ke publik beberapa hari setelah keduanya dimakamkan.

"Keluarga korban dan publik memiliki hak untuk mengetahui penyebab kematian dan mengetahui tuntas siapa yang bertanggung jawab," ujarnya.

Menurut Usman, tragedi menilik ini adalah petret buruk dari bahaya meningkatnya militerisme bagi warga sipil. Ia mendesak program pelatihan kemiliteran itu dihentikan.

"Ini harus dihentikan. Yang diperlukan adalah pelatihan keterampilan manajemen usaha dan komunikasi yang dialogis, bukan pelatihan militer yang berbasis kekuatan fisik dan komunikasi monologis," ucapnya.

Usman menambalihkan urusan manajemen bisnis dan perekonomian kepada masyarakat sipil tidak relevan dengan pelatihan ala militer. Apalagi hal ini bertentangan dengan prinsip koperasi.

"Bapak Koperasi Indonesia, Mohamad Hatta, dan Undang-Undang Nomor 25/1992, secara tegas menyatakan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. Keputusan tertinggi berada pada rapat anggota. Bukan pada sistem garis komando yang hierarkis layaknya militer," tutur Usman.

Untuk itu, Usman mendesak pemerintah harus segera menghentikan pendekatan militeristik dalam pengelolaan koperasi desa. Ia juga mendorong adanya investigasi independen yang mengusut tuntas kematian warga sipil tersebut.

Seneca, Direktur Eksekutif Imparsial Andi Manto Adiputra mengemukakan pelatihan yang menyebabkan tiga peserta meninggal. Ia menilai insiden tersebut menjadi bukti jika sistem pendidikan militer tidak sepenuhnya diterapkan secara serampangan kepada warga sipil. Ia pun menegaskan, tidak ada korelasi antara profesionalisme kerja dalam menjalankan tugas koperasi dan pelatihan bersayap kemiliteran. Oleh karena itu, Imparsial menuntut pertanggungjawaban penuh dari pihak penyelenggara.

Lebih jauh, Andi menyoroti pelibatan TNI dalam program KDKMP yang dinilai tidak tepat dan berbenturan dengan UU TNI. Khususnya mengenai ketentuan operasi militer selain perang (OMSP). Ia mengingatkan bahwa pendekatan militeristik sangat berpotensi mengikis budaya kritis dan inovatif yang menjadi urat nadi organisasi masyarakat sipil.

Reang dialog partisipatif yang lahir dalam tatanan demokratis. lanjut dia, rentan tergantikan pendekatan otoritatif yang berlandaskan kepatuhan pada perintah komando dalam penyelesaian masalah.

"Kami khawatir nilai-nilai dominan dalam lingkungan militer seperti kepatuhan, komando, dan hierarki dapat mengikis nilai-nilai yang seharusnya ada di masyarakat sipil, yaitu *critical thinking*, kreativitas, kebebasan berpikir, dan ruang untuk berargumentasi," tuturnya.

(DWL/DYT/RTG/CTP)